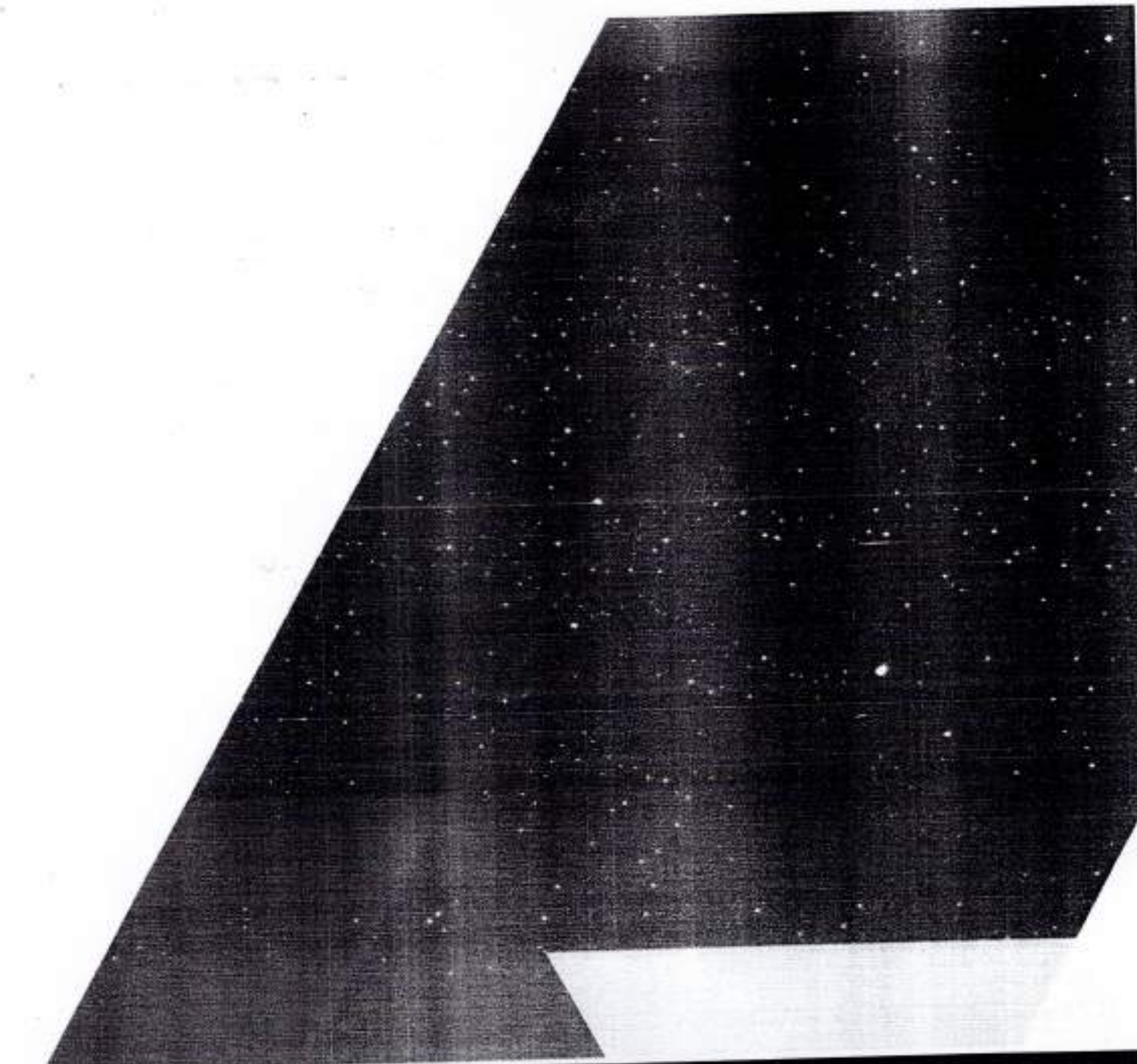


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**KABUPATEN TANAH DATAR**

## KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan dan pembangunan yang dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai Instansi Pemerintah juga berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai wewenang yang diberikan berdasarkan Rencana Strategik yang ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ini adalah merupakan representasi kinerja Instansi dalam pelaksanaan Tupoksi Tahun 2023 yang dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kinerja sebagai pertimbangan Strategis dalam melanjutkan rencana kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan sebagai bahan bagi pihak-pihak dalam menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan kami menerima masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD kami dimasa datang.

  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**  
  
**Ir. HELFY RAHMY HARUN**  
NIP. 19671029 199403 2 003

## DAFTAR ISI

|                                                    | Hal |
|----------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                               | i   |
| DAFTAR ISI .....                                   | ii  |
| <br>                                               |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1   |
| A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....     | 1   |
| B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah .....  | 2   |
| C. Sistematika Penulisan .....                     | 3   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                   | 5   |
| A. Rencana Strategis .....                         | 5   |
| B. Perjanjian Kinerja .....                        | 8   |
| C. Rencana Kerja dan Anggaran .....                | 9   |
| <br>                                               |     |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                | 11  |
| A. Hasil Pengukuran Kinerja .....                  | 11  |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....                  | 12  |
| C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran ..... | 17  |
| BAB IV PENUTUP .....                               | 27  |
| LAMPIRAN                                           |     |

## DAFTAR ISI

|                                                    | Hal |
|----------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                               | i   |
| DAFTAR ISI .....                                   | ii  |
| <br>                                               |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1   |
| A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....     | 1   |
| B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah .....  | 2   |
| C. Sistematika Penulisan .....                     | 3   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                   | 5   |
| A. Rencana Strategis .....                         | 5   |
| B. Perjanjian Kinerja .....                        | 8   |
| C. Rencana Kerja dan Anggaran .....                | 9   |
| <br>                                               |     |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                | 11  |
| A. Hasil Pengukuran Kinerja .....                  | 11  |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....                  | 12  |
| C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran ..... | 17  |
| BAB IV PENUTUP .....                               | 27  |
| LAMPIRAN                                           |     |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah membantu melaksanakan fungsi **penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dengan uraian tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Jabatan Fungsional
2. Bidang Anggaran
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
  - b. Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Jabatan Fungsional

3. Bidang Perbendaharaan
  - a. Sub Bidang Penatausahaan Pemerimaan Daerah
  - b. Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Daerah
  - c. Jabatan Fungsional
4. Bidang Akuntansi
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - b. Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi
  - c. Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolaan Aset
  - a. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan
  - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset
  - c. Jabatan Fungsional

#### **B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah**

Peran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengelolaan aset daerah. Peranan tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

1. Penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan
3. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berusaha untuk melakukan inovasi dan terobosan serta kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

### C. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini di uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. PERENCANAAN KINERJA

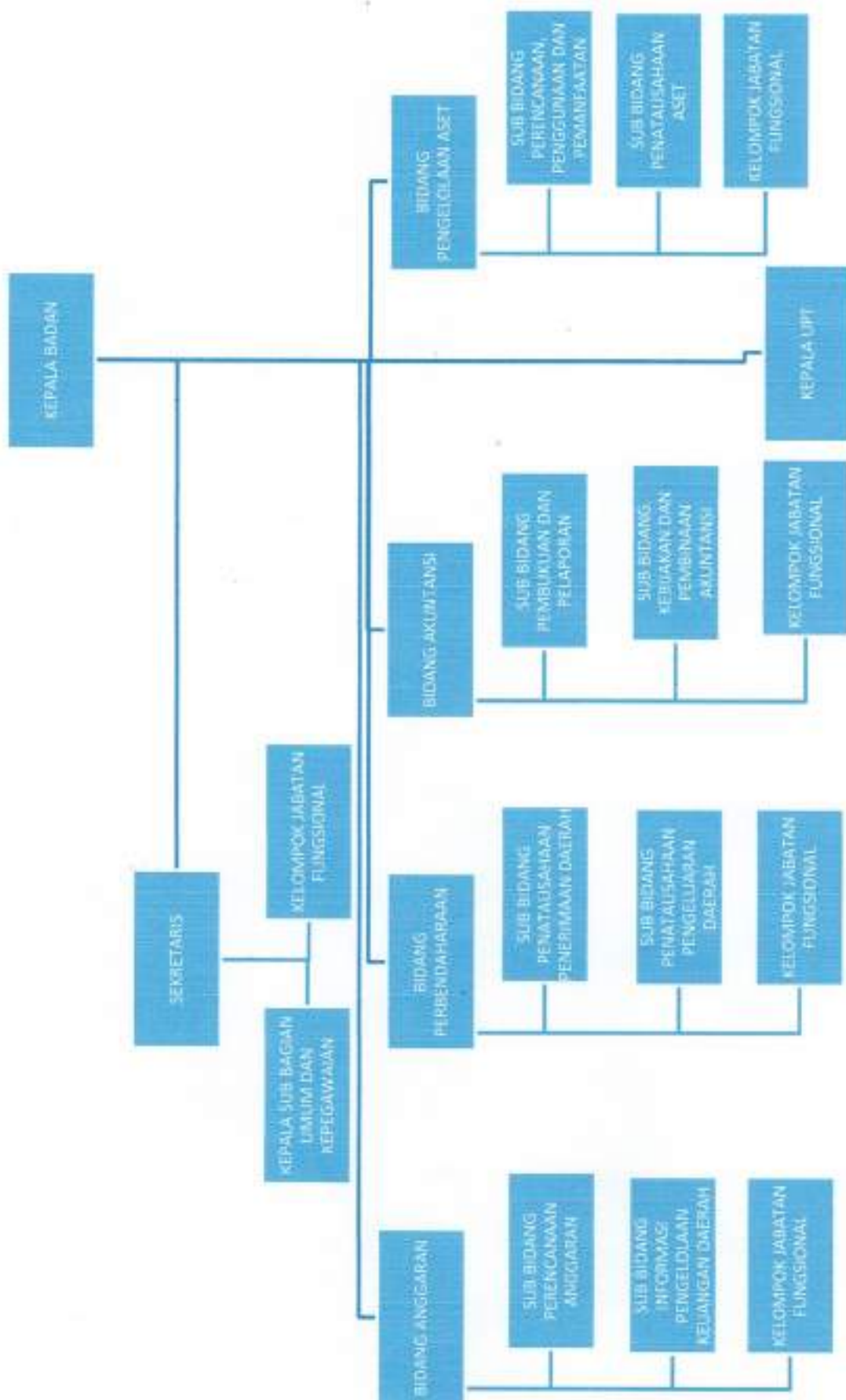
B. Pada bab ini di uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

#### BAB IV PENUTUP

##### A. Kesimpulan

##### B. Saran

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan setelah dilaksanakan reviu pada tahun 2017 dan telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode RPJMD. Dokumen Renstra ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, sebagaimana sebagai berikut:

##### a. Visi

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas daerah, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 adalah:

---

*Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabilitas melalui management yang baik dengan menggunakan teknologi informasi*

---

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi mengikat Pimpinan dan Staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk komitmen guna mencapai tujuan organisasi.

Kemudian apabila diinterpretasikan ke dalam perspektif *balanced scorecard*, pernyataan Visi tersebut setidaknya sudah memperlihatkan keseimbangan diantara perspektif utama suatu organisasi : perspektif customer (*stakeholder* atau *pelanggan*), perspektif internal proses (*proses internal*) dan perspektif learning and growth (*pembelajaran dan pertumbuhan*).

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang prima melalui manajemen yang baik merupakan bagian dari Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar pada perspektif customer. Pada masa datang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dipandang oleh *stakeholder* terkait sebagai Pengelola Keuangan dan Aset yang prima untuk dapat mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas publik pada segenap manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.

Visi pada perspektif *customer* tersebut akan tercapai melalui manajemen efektif dibidang pengelolaan Keuangan Daerah. Aspek manajemen efektif merupakan bagian dari visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk perspektif internal proses dan perspektif *learning and growth*. Disini manajemen akan mewujudkan kesempurnaan dalam proses internal yang didukung oleh sumber daya manusia yang senantiasa mau belajar dan bertumbuh mengikuti perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus berdinamika.

**b. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. *Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab*
2. *Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat*
3. *Penerapan Teknologi Informasi untuk pengelolaan keuangan daerah*

**c. Sasaran Strategis**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Tanah Datar  
dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

| MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN |                           |                                                  |                                 |                                                                      |                                 |               |                                                                       |                             |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RPJM                                                                             |                           |                                                  |                                 | RENSTRA 2021 – 2026                                                  |                                 |               |                                                                       |                             |                                                                                |
| Tujuan                                                                           | Indikator                 | Sasaran                                          | Indikator                       | Tujuan                                                               | Indikator Tujuan                | Target Tujuan | Sasaran                                                               | Indikator Sasaran           | Program                                                                        |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien        | Indek reformasi birokrasi | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK atas laporan keuangan | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, efektif dan efisien | Opini BPK atas laporan keuangan | WTP           | a. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel | wtp                         | Program Pengelolaan keuangan daerah<br>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
|                                                                                  |                           |                                                  |                                 |                                                                      |                                 |               | b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     |

Sementara itu untuk indikator kinerja Utama Badan pengelolaan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD Nomor 900/008/ BPKD /2023 yaitu :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Tahun 2021-2026

| Tujuan                                                               | Sasaran Strategis                                                  | Indikator kinerja               | Satuan | Rumusan perhitungan | Sumber Data  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, efektif dan efisien | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Opini BPK atas laporan keuangan | WTP    | Opini BPK           | Renstra BPKD |
|                                                                      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah           | Nilai Akuntabilitas Kinerja     | BB     | Nilai Akip          | Renstra BPKD |

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**

| No. | Sasaran Strategis                                                      | Indikator Kinerja                                     | Target | Program/Kegiatan                                                                             | Anggaran        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabilitas | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP    | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                          | 176.256.410.166 |
|     |                                                                        |                                                       |        | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            | 1.240.927.160   |
|     |                                                                        |                                                       |        | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                             | 228.850.376     |
|     |                                                                        |                                                       |        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | 249.136.380     |
|     |                                                                        |                                                       |        | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | 174.400.483.833 |
|     |                                                                        |                                                       |        | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 137.012.000     |
|     |                                                                        |                                                       |        | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                      | 1.383.685.390   |
|     |                                                                        |                                                       |        | Pengelolaan Barang Milik daerah                                                              | 1.383.685.390   |
|     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja                                     | Nilai Akuntabilitas Kinerja                           | BB     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 5.217.292.121   |
|     | Terwujudnya inovasi berkelanjutan                                      | Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan              | 1      |                                                                                              |                 |

#### C. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun. Acuan ini terdiri atas sasaran kegiatan/output, indikator kinerja kegiatan, target pencapaian serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel : 2.3 Recana Anggaran Kegiatan Tahun 2023**

| Sasaran                                                              | Indikator                          | Target | Program/Kegiatan                                                                                      | Anggaran        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel   | Opini BPK atas Laporan keuangan    | WTP    | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                   | 176.256.410.166 |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            | 1.240.927.577   |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                             | 228.850.376     |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | 249.136.380     |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | 174.400.483.833 |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 137.012.000     |
|                                                                      |                                    |        | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                               | 1.383.685.390   |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | 1.383.685.390   |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah | BB     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                           | 5.217.292.121   |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 13.958.000      |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | 4.333.696.145   |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | 14.000.000      |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | 297.670.726     |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | 259.432.000     |
|                                                                      |                                    |        | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 298.535.250     |
|                                                                      |                                    |        |                                                                                                       |                 |

Dari tabel Rencana Kegiatan terlihat bahwa pada Tahun 2023 untuk mencapai 2 sasaran dengan masing- masing indikatornya, BPKD didukung oleh 3 Program dan 12 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 182.857.387.677,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 adalah perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menilai pelaksanaan progra dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka mencapai Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023. Pengukuran kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis.

#### A. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian 2 (dua) indikator kinerja utama untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

| NO | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja                                     | Target | Realisasi | Tingkat Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1. | Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP    | WTP       | WTP             |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja badan keuangan daerah           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah                    | BB     | BB        | BB              |

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai capaian sasaran strategis serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan berdasarkan kategori penilaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja**

| INTERVAL NILAI | KRITERIA PENILAIAN |
|----------------|--------------------|
| Diatas 100     | Sangat memuaskan   |
| 85 – 100       | Sangat baik        |
| 70 – 85        | Baik               |
| 55 – 70        | Sedang             |
| 0 – 55         | Kurang baik        |

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dimana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator dengan masing-masing target yang dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar.

Capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran  
Strategis  
1

• **Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel**

Capaian target kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Indikator Capaian Target Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel**

| No. | Indikator                                       | Tahun 2022<br>(Laporan Keuangan 2021) |           |     | Tahun 2023<br>(Laporan Keuangan 2022) |           |     | Target tahun 2023 (akhir realisasi) | %   |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----|
|     |                                                 | Target                                | Realisasi | %   | Target                                | Realisasi | %   |                                     |     |
| 1.  | Opini BPK Terhadap Keuangan Pemerintahan Daerah | WTP                                   | WTP       | 100 | WTP                                   | WTP       | 100 | WTP                                 | 100 |

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada tahun 2022 dapat terealisasi 100% artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sasaran pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan menjadi sasaran utama dari beberapa target pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan misi, pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan namun Badan Pengelola Keuangan Daerah terus melakukan perubahan dari sisi kualitas laporan keuangan.

Capaian ini diperoleh dengan upaya yang dilakukan adalah:

- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- Perencanaan dan penetapan APBD yang tepat waktu sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
- Penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Sistem/aplikasi pengelolaan keuangan yang memadai
- SDM yang handal di bidang masing-masing.
- Penyesuaian regulasi yang ada dengan aturan yang lebih tinggi

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi pemerintah ( SAP);
2. Adanya Kecukupan informasi Keuangan dalam Laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;
4. Efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalian intern.



Gambar 3.1. Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan Opini WTP

Pada tahun 2023, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 yang memuat opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk dua belas kalinya sejak laporan keuangan Tahun 2009 dan berturut-turut 12 kali (2012-2022).

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui BPKD untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

1. Untuk verifikasi Pendapatan, Realisasi Belanja dan Realisasi Pembiayaan, dilakukan rekonsiliasi keuangan dan aset setiap semester dan tahunan
2. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai aplikasi pendukung.
3. Untuk masalah-masalah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIMDA juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp dimana setiap permasalahan yang di alami oleh SKPD akan segera diupayakan penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di BPKD.

Faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK :

1. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
2. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang:

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
- e. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.

- f. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD terkait masalah-masalah yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat aplikasi keuangan daerah yang dicetus oleh pemerintah Pusat ini belum sepenuhnya optimal untuk dilaksanakan, sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Datar senantiasa tetap menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal ini demi menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanah Datar

## Sasaran Strategis 2

### •Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, ditetapkan 1 sasaran kinerja dengan 1 (satu) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

| No | Indikator Kinerja                               | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         |
|----|-------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |                                                 | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB         | BB        | 100%    | BB         | BB        | 100%    |

Untuk sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator "nilai Akuntabilitas Kinerja ", untuk Tahun 2023 yang merupakan penilaian indikator Tahun 2022, BPKD memperoleh nilai BB (74,55% ) dari 100% pencapaian.

## Sasaran Strategis 3

### •Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya inovasi berkelanjutan, ditetapkan 1 sasaran kinerja dengan 1 (satu) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja                        | Target 2022 | Realisasi  |             |              |             | Capaian % |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
|                                          |             | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |           |
| Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan | 1           | -          | 1           | 1            | 1           | 80%       |

#### Indikator Kinerja 4 : Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

Indikator kinerja Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sesuai target pada tahun 2023, 1 (satu) inovasi yaitu SP2D Online sebagai salah satu bentuk aplikasi pelaksanaan transaksi non tunai serta mempercepat proses pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima, sehingga terlaksana pencairan SP2D tepat waktu.

#### C. Akuntabilitas keuangan/Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian target Tahunan BPKD, maka pada Tahun 2023 mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. **182.857.387.677,-** dengan realisasi keuangan s/d akhir Tahun 2023 sebesar Rp. **177.214.641.888** atau sebesar **97,89 %**, dengan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,58%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program dengan 12 Kegiatan dan 50 sub kegiatan. Adapun Program, kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2023**

| No | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                       | Anggaran Tahun 2023  | Realisasi     |                      |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|    |                                                                       |                      | Fisik (%)     | Keuangan             | %            |
| 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>    | <b>5.217.292.121</b> | <b>100,00</b> | <b>5.131.477.109</b> | <b>98,36</b> |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 13.958.000           | 100,00        | 13.923.200           | 9,75         |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 4.333.696.145        | 100,00        | 4.288.167.453        | 8,95         |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 14.000.000           | 100,00        | 13.651.731           | 7,51         |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 297.670.726          | 100,00        | 286.558.711          | 96,27        |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 259.432.000          | 100,00        | 254.591.482          | 8,13         |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 298.535.250          | 100,00        | 274.584.532          | 1,98         |

| No           | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                              | Anggaran Tahun 2023    | Realisasi    |                        |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|              |                                                                                              |                        | Fisik (%)    | Keuangan               | %            |
| 2            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                   | 176.258.410.166        | 93,40        | 170.720.659.140        | 96,86        |
|              | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            | 1.240.927.577          | 100,00       | 1.109.085.165          | 89,38        |
|              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                             | 228.850.376            | 100,00       | 227.883.122            | 9,58         |
|              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | 249.136.380            | 100,00       | 224.421.519            | 0,08         |
|              | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | 174.400.483.833        | 67,00        | 169.048.173.459        | 96,93        |
|              | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 137.012.000            | 100,00       | 111.095.875            | 1,08         |
| 3            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                               | 1.383.685.390          | 100,00       | 1.362.505.639          | 98,47        |
|              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | 1.383.685.390          | 100,00       | 1.362.505.639          | 98,47        |
| <b>Total</b> |                                                                                              | <b>182.857.387.677</b> | <b>97,80</b> | <b>177.214.641.888</b> | <b>97,89</b> |

Dari rincian alokasi dan realisasi belanja program dan kegiatan diatas, maka secara keseluruhan realisaai belanja BPKD menurut jenis belanja tahun 2023 adalah sbb :

**Tabel 3.6 : Realisasi Menurut Jenis Belanja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023**

| No. | Uraian Belanja             | Target Rp.             | Realisasi    |                        |              |
|-----|----------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|     |                            |                        | Fisik (%)    | Keuangan               | %            |
| 1.  | Belanja Operasi            | 8.457.568.244          | 100          | 8.173.638.056          | 96,64        |
|     | a. Belanja Pegawai         | 4.313.896.145          | 100          | 4.268.178.053          | 98,94        |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa | 4.143.672.099          | 100          | 3.905.460.003          | 94,25        |
| 2.  | Belanja Modal              | 66.500.000             | 100          | 59.299.998             | 89,17        |
| 3.  | Belanja Tidak Terduga      | 2.789.486.800          | 35           | 954.498.507            | 34,22        |
| 4.  | Belanja Tansfer            | 171.543.832.633        | 100          | 168.093.674.952        | 97,99        |
|     | <b>Jumlah Belanja</b>      | <b>182.857.387.677</b> | <b>98,70</b> | <b>177.281.111.513</b> | <b>96,95</b> |

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, BPKD melaksanakan serangkaian Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerjanya yaitu :

**1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel**

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk Untuk mendukung sasaran kinerja ini dilaksanakan oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dan Pengelolaan aset

Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran terwujudnya kualitas Pengelolaan Keuangan ini adalah:

**I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

**1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dengan anggaran Rp.64.554.405,00 dengan realisasi sebesar Rp.61.228.375,00 (94,85%)
- Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan anggaran Rp.65.096.601,00 dengan realisasi sebesar Rp.63.640.315,00 (97,76%)
- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD dengan anggaran Rp.17.467.160,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.457.500,00 (94,22%)
- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp.18.751.480,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.675.700,00 (99,60%)
- Koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan anggaran Rp.936.074.820,00 dengan realisasi sebesar Rp.824.277.683,00 (88,06%)
- Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dengan anggaran Rp.103.274.106,00 dengan realisasi sebesar Rp.101.176.533,00 (97,97%)
- Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran dengan anggaran Rp.35.709.005,00 realisasi sebesar Rp.24.082.259,00 (67,44%)

**2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran dianggarkan Rp.43.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.948.647,00 (99,88%)
- Koordinasi , fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya dengan anggaran Rp.88.740.376,00 dengan realisasi sebesar Rp.88.246.500,00 (99,44%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan anggaran Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.49.765.175,00 (99,53%)
  - Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dengan anggaran Rp.2.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.680.000,00 (100%)
  - Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan anggaran Rp. 19.430.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.278.000,00 (99,52%)
  - Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban dengan anggaran Rp.25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.964.800,00 (99,86%)
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan anggaran Rp.25.371.200,00 dengan realisasi sebesar Rp17.674.289,00 (69,66%)
  - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan anggaran Rp.82.203.300,00 dengan realisasi sebesar Rp53.267.825,00 (64,80%)
  - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.50.993.310,00 dengan realisasi sebesar Rp.43.690.835,00 (85,68%)
  - Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. Rp.87.006.970,00 dengan realisasi sebesar Rp.87.006.970,00 (100%)
  - Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK dan LHP APIP atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan anggaran 3.561.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.561.600,00 (100%)
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dengan anggaran Rp.171.610.997.033,00 dengan realisasi Rp.168.160.144.577,00 (97,99%)

- Pengelolaan dana darurat dan mendesak dengan anggaran Rp.2.789.485.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.954.498.507,00 (34,22)%
- 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  - Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah dengan anggaran Rp.137.012.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.111.095.875,00 (81,08%)

## II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

### 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan standar harga dengan anggaran Rp. 29.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.238.029,00 (95,11%)
- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan anggaran Rp.13.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.305.125,00 (98,92%)
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp. 22.085.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.912.723,00 (99,22%)
- Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp.23.282.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.843.654,00 (98,12%)
- Inventarisasi barang milik daerah dengan anggaran Rp.24.152.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.900.000,00 (69,98%)
- Pengamanan barang milik daerah dengan anggaran Rp.1.189.217.525,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.183.493.043,00 (99,52%)
- Penilaian barang milik daerah dengan anggaran Rp.18.047.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.246.100,00 (90,02%)
- Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah Sub kegiatan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah terealisasi berupa dokumen pengalihan status barang milik daerah dengan dana Rp.19.665.665,00 dengan realisasi sebesar Rp.17.620.665,00 (89,60%)
- Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dengan anggaran Rp.12.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.962.000,00 (92,51%)

- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp.21.511.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.538.500,00 (95,48%)
- Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota dengan anggaran Rp.9.653.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.945.000,00 (92,66%)

## 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk Untuk mendukung sasaran kinerja ini dilaksanakan oleh Sekretariat BPKD.

Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:

### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp.7.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.486.200,00 (99,75%)
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.6.458.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.437.000,00 (99,67%)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran 4.313.696.145,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.268.278.053,00 (98,94%)
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan Rp.20.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.989.400,00 (99,95%)
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran Rp.14.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.13.651.731,00 (97,51%)
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp.8.999.100,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.211.048,00 (57,91%)
  - Penyediaan bahan logistik kantor

Sub Kegiatan ini terealisasi berupa, pembelian alat tulis kantor dengan anggaran Rp.77.545.170,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.77.545.543,00 (100%)

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp.25.351.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.346.957,00 (99,98%)
  - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan anggaran Rp.3.050.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.658.000,00 (87,15%)
  - Fasilitas kunjungan tamu dengan anggaran Rp.14.217.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.13.958.300,00 (96,04%)
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.168.507.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.161.840.863,00 (96,04%)
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp.3.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.240.000,00 (74,67%)
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp.113.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.110.183.874,00 (97,51%)
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp.143.432.000,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp.234.860.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.214.190.622,00 (91,20%)
  - Pemeliharaan Mebel  
Sub Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan Mebel dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000,00 (100%)
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp.23.675.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.591.469,00 (86,98%)
  - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.802.441,00 (99,44%)

**Tabel 3.7**  
**Realisasi & Capaian Kinerja Sub Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

| No  | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                        | Target                       | Realisasi                    | Capaian Kinerja | Anggaran      | Realisasi     | Persentase Realisasi (%) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| I.  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                     |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 2 Dok                        | 2 Dok                        | 100,00          | 7.500.000     | 7.486.200     | 99,82                    |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     | 4 Dok                        | 4 Dok                        | 100,00          | 6.458.000     | 5.983.800     | 92,65                    |
| 2   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                          |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 38 org                       | 38 org                       | 100,00          | 4.313.695.145 | 4.268.178.053 | 98,94                    |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | 2 Dok                        | 2 Dok                        | 100,00          | 20.000.000    | 19.989.400    | 99,95                    |
| 3   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 5 Org                        | 2 org                        | 100,00          | 14.000.000    | 13.651.731    | 97,51                    |
| 4   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                              |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 1 Paket                      | 1 Paket                      | 100,00          | 8.999.100     | 5.211.048     | 57,91                    |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 1 Paket                      | 1 Paket                      | 100,00          | 77.545.170    | 77.543.543    | 100,00                   |
| 3   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 1 Paket                      | 1 Paket                      | 100,00          | 25.351.500    | 25.346.957    | 99,98                    |
| 4   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 2 jenis                      | 2 jenis                      | 100,00          | 3.050.000     | 2.658.000     | 87,15                    |
| 5   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 1 Lap                        | 1 Lap                        | 100,00          | 14.217.500    | 13.958.300    | 98,18                    |
| 6   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 1 Lap                        | 1 Lap                        | 100,00          | 166.507.456   | 161.840.863   | 96,04                    |
| 5   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                            |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 2 lap                        | 2 lap                        | 100,00          | 3.000.000     | 2.240.000     | 74,67                    |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 12 lap                       | 12 lap                       | 100,00          | 113.000.000   | 110.183.874   | 97,51                    |
| 3   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  | 4 lap                        | 4 lap                        | 100,00          | 143.432.000   | 142.167.608   | 99,12                    |
| 6   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>           |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | roda 4 6 unit, roda 2,5 unit | roda 4 6 unit, roda 2,5 unit | 100,00          | 234.850.250   | 214.190.622   | 91,20                    |
| 2   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                               | 25 unit                      | 25 unit                      | 100,00          | 23.875.000    | 20.591.469    | 86,28                    |
| 3   | Pemeliharaan Mebel                                                                     | 1 unit                       | 1 unit                       | 100,00          | 5.000.000     | 5.000.000     | 100,00                   |
| 4   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                          | 1 unit                       | 1 unit                       | 100,00          | 35.000.000    | 34.802.441    | 99,44                    |
| II. | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                             |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                               |                              |                              |                 |               |               |                          |
| 1   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                 | 2 Dok                        | 2 Dok                        | 100,00          | 64.554.405    | 61.228.375    | 94,85                    |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                             | 2 Dok                        | 2 Dok                        | 100,00          | 65.096.601    | 63.640.315    | 97,76                    |

| No | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target     | Realisasi  | Capaian Kinerja | Anggaran        | Realisasi       | Persentase Realisasi (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 3  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                    | 39 Dok     | 39 Dok     | 100,00          | 17.467.160      | 16.457.500      | 94,22                    |
| 4  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                                                                              | 38 Dok     | 38 Dok     | 100,00          | 18.751.480      | 18.675.700      | 99,60                    |
| 5  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                 | 2 Dok      | 2 Dok      | 100,00          | 836.074.820     | 824.277.683     | 98,05                    |
| 6  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                             | 2 Dok      | 2 Dok      | 100,00          | 103.274.106     | 101.176.533     | 97,97                    |
| 7  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                          | 6 Dok      | 6 Dok      | 100,00          | 35.709.005      | 24.082.259      | 67,44                    |
|    |                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |                 |                 |                          |
|    |                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 2  | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                     |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 1  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                       | 12 Dok     | 12 Dok     | 100,00          | 43.000.000      | 42.948.647      | 99,88                    |
| 2  | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                   | 5 Dok      | 5 Dok      | 100,00          | 88.740.376      | 88.246.500      | 99,44                    |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (FPK) | 40 Dok     | 40 Dok     | 100,00          | 50.000.000      | 49.765.175      | 99,53                    |
| 4  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan                                                                                                              | 12 Dok     | 12 Dok     | 100,00          | 2.680.000       | 2.680.000       | 100,00                   |
| 5  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                          | 4 Instansi | 4 Instansi | 100,00          | 19.430.000      | 19.276.000      | 99,22                    |
| 6  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                               | 3 Keg      | 3 Keg      | 100,00          | 25.000.000      | 24.954.800      | 99,88                    |
|    |                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 3  | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                   |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 1  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                      | 12 lap     | 12 lap     | 100,00          | 25.371.200      | 17.674.289      | 69,66                    |
| 2  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran                                                                                          | 12 Dok     | 12 Dok     | 100,00          | 82.203.300      | 72.487.825      | 88,18                    |
| 3  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                              | 1 Dok      | 1 Dok      | 100,00          | 50.993.310      | 43.690.635      | 85,68                    |
| 4  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran                          | 4 Dok      | 4 Dok      | 100,00          | 87.006.970      | 87.006.970      | 100,00                   |
| 5  | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                        | 1 LHP      | 1 LHP      | 100,00          | 3.561.600       | 3.561.600       | 100,00                   |
|    |                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 4  | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                              |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 1  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                        | 14 Kec     | 14 Kec     | 100,00          | 171.610.997.033 | 168.160.144.577 | 97,99                    |
| 2  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                       | 1 Th       | 1 Th       | 35,00           | 2.789.488.800   | 954.498.507     | 34,22                    |
|    |                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 5  | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                         |            |            |                 |                 |                 |                          |
| 1  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan                                                                                                            | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 100,00          | 137.012.000     | 111.095.875     | 81,08                    |
|    |                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |                 |                 |                          |

| No    | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                     | Target       | Realisasi    | Capaian Kinerja | Anggaran        | Realisasi       | Persentase Realisasi (%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| III.  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                             |              |              |                 |                 |                 |                          |
| 1     | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                     |              |              |                 |                 |                 |                          |
| 1     | Penyusunan Standar Harga                                                            | 2 Dok        | 2 Dok        | 100,00          | 29.890.000      | 28.238.029      | 95,11                    |
| 2     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                | 2 Dok        | 2 Dok        | 100,00          | 13.450.000      | 13.305.125      | 98,92                    |
| 3     | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                | 5 Perbub     | 5 Perbub     | 100,00          | 22.085.000      | 21.912.723      | 99,22                    |
| 4     | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                   | 39 OPD       | 39 OPD       | 100,00          | 23.282.000      | 22.843.654      | 98,12                    |
| 5     | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                   | 39 OPD       | 39 OPD       | 100,00          | 24.152.500      | 16.900.800      | 69,98                    |
| 6     | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                      | 6 Dok        | 6 Dok        | 100,00          | 1.189.217.525   | 1.183.993.043   | 99,58                    |
| 7     | Penilaian Barang Milik Daerah                                                       | 10 Dok       | 10 Dok       | 100,00          | 18.047.500      | 16.246.100      | 90,02                    |
| 8     | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                         | 39 OPD       | 39 OPD       | 100,00          | 19.885.885      | 17.620.885      | 88,60                    |
| 9     | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan | 25 SK Bupati | 25 SK Bupati | 100,00          | 12.930.000      | 11.962.000      | 92,51                    |
| 10    | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                    | 39 OPD       | 39 OPD       | 100,00          | 21.511.800      | 20.536.500      | 95,48                    |
| 11    | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                 | 39 OPD       | 39 OPD       | 100,00          | 9.653.400       | 8.945.000       | 92,66                    |
| Total |                                                                                     |              |              | 99,70           | 182.857.387.677 | 177.281.111.613 | 96,95                    |

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan dan anggaran tahun 2023, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Laporan Kinerja berperan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar kepada para *stakeholders*. Disamping itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya "*good governance*". Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja adalah media pertanggungjawaban kepada publik.

#### B. SARAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, kinerja Badan Keuangan Daerah secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 tersebut telah sempurna. Upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kinerja harus terus dilakukan demi peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta terinventarisirnya Aset Daerah, sehingga visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya, dan visi misi Kabupaten Tanah Datar pada umumnya dapat diwujudkan.